

## PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Nuraini Nst<sup>1</sup>, Syamzaimar<sup>2</sup>

[sofianvivo142@gmail.com](mailto:sofianvivo142@gmail.com)<sup>1</sup>, [syamzaimar0774@gmail.com](mailto:syamzaimar0774@gmail.com)<sup>2</sup>

Institut Sains Al-qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pangaraian

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjaga stabilitas serta mewujudkan cita-cita nasional. Lima pilar utama yang menjadi fokus kajian adalah ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945, persatuan dalam keberagaman, demokrasi, dan keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui analisis literatur, dokumen resmi, serta observasi fenomena sosial yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima pilar tersebut tetap relevan sebagai fondasi bangsa, namun masing-masing menghadapi tantangan yang berbeda. Pancasila masih perlu diperkuat melalui internalisasi nilai agar tidak sekadar menjadi slogan, melainkan benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari. Konstitusi UUD 1945 telah memberikan kerangka hukum yang jelas, tetapi implementasi di lapangan seringkali belum konsisten sehingga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga negara. Persatuan bangsa masih terjaga, namun polarisasi politik dan konflik sosial menunjukkan rapuhnya ikatan kebangsaan. Demokrasi berjalan melalui sistem pemilu, tetapi kualitasnya masih perlu ditingkatkan dengan memperkuat literasi politik dan partisipasi masyarakat. Keadilan sosial sebagai tujuan akhir kehidupan berbangsa masih menghadapi hambatan berupa kesenjangan ekonomi dan praktik korupsi yang merusak pemerataan pembangunan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa memperkuat kelima pilar kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan kunci untuk menjaga identitas nasional, memperkuat stabilitas, serta mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

**Kata Kunci:** Pancasila, UUD 1945, Persatuan, Demokrasi, Keadilan Sosial.

### ABSTRACT

*This study aims to examine in depth the role of the pillars of national life in maintaining stability and achieving national ideals. The five main pillars analyzed are the ideology of Pancasila, the 1945 Constitution, unity in diversity, democracy, and social justice. The research method applied is qualitative with a descriptive approach, involving literature review, official document analysis, and observation of relevant social phenomena. The findings indicate that these pillars remain highly relevant as the nation's foundation, yet each faces distinct challenges. Pancasila requires stronger internalization of values so that it is not merely a slogan but truly embedded in daily practice. The 1945 Constitution provides a clear legal framework, but its implementation in practice is often inconsistent, leading to a crisis of trust in state institutions. National unity is still preserved, but political polarization and social conflicts reveal the fragility of cohesion. Democracy functions through the electoral system, yet its quality needs improvement by strengthening political literacy and public participation. Social justice, as the ultimate goal of national life, continues to face obstacles such as economic inequality and corruption that undermine equitable development. The conclusion emphasizes that reinforcing these five pillars of national life is essential to safeguard national identity, strengthen stability, and realize a just, prosperous, and welfare-oriented society.*

**Keywords:** Pancasila, 1945 Constitution, Unity, Democracy, Social Justice

### PENDAHULUAN

Kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu proses panjang yang melibatkan interaksi antara nilai-nilai dasar, sistem hukum, budaya, serta praktik politik yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah (Muhammad Sabiq Balya, 2025). Dalam

konteks Indonesia, keberadaan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sangat penting karena bangsa ini memiliki karakteristik unik: wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, serta keberagaman etnis, agama, bahasa, dan budaya. Tanpa adanya pilar yang kokoh, kehidupan berbangsa akan mudah goyah, dan negara akan kesulitan menjaga stabilitas serta mewujudkan cita-cita nasional.

Oleh sebab itu, pembahasan mengenai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk terus diperkuat. Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dipahami sebagai fondasi utama yang menopang keberlangsungan suatu bangsa. Pilar ini mencakup ideologi, konstitusi, persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial. Kelima aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan saling menguatkan. Ideologi memberikan arah dan nilai dasar, konstitusi menyediakan kerangka hukum, persatuan menjaga keutuhan bangsa, demokrasi menjamin partisipasi rakyat, dan keadilan sosial memastikan kesejahteraan yang merata (Mutmainnah and Maulia, 2024).

Tanpa salah satu di antaranya, kehidupan berbangsa akan timpang dan berpotensi menimbulkan krisis. Dalam sejarah Indonesia, pilar-pilar tersebut telah dirumuskan secara jelas melalui Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sistem demokrasi yang dijalankan, serta komitmen terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pancasila, sebagai ideologi bangsa, menjadi sumber nilai dan pedoman moral yang mengikat seluruh warga negara. UUD 1945 berfungsi sebagai konstitusi yang mengatur tata kehidupan bernegara. Bhinneka Tunggal Ika menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman (Firiza et al., 2025).

Proses pembelajaran yang menanamkan kesadaran, pengetahuan, dan sikap warga negara bertujuan membentuk individu yang mampu menjalankan peran serta tanggung jawabnya dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Melalui proses ini, seseorang tidak hanya memahami hak dan kewajiban, tetapi juga diarahkan untuk memiliki karakter yang kokoh, berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai demokrasi, keadilan, dan persatuan (Syamzaimar, 2025).

Demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah bangsa. Sementara itu, keadilan sosial menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai, yaitu kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia (Nuna and Moonti, 2019). Namun, dalam praktiknya, pilar-pilar tersebut sering menghadapi tantangan. Globalisasi, perkembangan teknologi, serta dinamika politik dan ekonomi dunia membawa pengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa. Nilai-nilai ideologi terkadang tergerus oleh arus budaya asing, konstitusi menghadapi tantangan dalam penegakan hukum, persatuan diuji oleh konflik sosial dan politik, demokrasi sering diwarnai oleh praktik yang tidak sehat, dan keadilan sosial masih jauh dari harapan karena kesenjangan ekonomi yang tinggi.

Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk terus mengkaji, memperkuat, dan mengimplementasikan pilar-pilar tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai pentingnya pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Artikel ini akan menguraikan secara konseptual bagaimana pilar-pilar tersebut berfungsi, apa saja tantangan yang dihadapi, serta bagaimana strategi untuk memperkuatnya. Dengan demikian, diharapkan pembahasan ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran dan praktik kehidupan berbangsa yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Selain itu, pembahasan mengenai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara juga memiliki relevansi akademik dan praktis. Secara akademik, kajian ini memperkaya literatur tentang teori politik, filsafat negara, serta ilmu sosial yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa. Secara praktis, kajian ini memberikan panduan bagi pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Misalnya, dalam dunia pendidikan, pilar-pilar tersebut dapat dijadikan materi pembelajaran untuk menumbuhkan karakter bangsa yang kuat. Dalam dunia politik, pilar-pilar tersebut dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan kebijakan publik. Dalam kehidupan sosial, pilar-pilar tersebut dapat dijadikan landasan untuk membangun solidaritas dan toleransi (Zalukhu, 2025).

Urgensi pembahasan ini semakin terasa ketika melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya, meningkatnya polarisasi politik, melemahnya rasa persatuan, serta maraknya praktik korupsi yang merusak keadilan sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara belum sepenuhnya kokoh. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengancam keberlangsungan bangsa. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk memperkuat pilar-pilar tersebut melalui pendidikan, kebijakan, serta praktik kehidupan sehari-hari (Irham, 2017).

Dalam konteks global, banyak negara yang runtuh atau mengalami krisis karena lemahnya pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik etnis, ketidakadilan sosial, serta lemahnya sistem hukum sering menjadi penyebab utama. Indonesia harus belajar dari pengalaman tersebut agar tidak mengalami hal serupa. Dengan memperkuat pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia dapat menjaga stabilitas, memperkuat identitas nasional, serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Secara keseluruhan, pendahuluan ini menegaskan bahwa pilar kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan fondasi yang tidak boleh diabaikan. Pilar tersebut harus terus diperkuat melalui kajian konseptual, implementasi praktis, serta komitmen bersama seluruh elemen bangsa. Artikel ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai masing-masing pilar, tantangan yang dihadapi, serta strategi untuk memperkuatnya. Dengan demikian, diharapkan pembahasan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia (Benawa, 2012).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali makna, memahami fenomena sosial, serta menafsirkan nilai-nilai yang terkandung dalam pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam konsep ideologi, konstitusi, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia.

Tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan data literatur. Peneliti menelusuri buku, jurnal, prosiding, dan laporan penelitian yang relevan dengan tema. Literatur yang dipilih dibatasi pada sepuluh tahun terakhir untuk buku dan lima tahun terakhir untuk jurnal serta prosiding, agar kajian tetap mutakhir. Data literatur ini menjadi bahan utama dalam membangun kerangka konseptual penelitian.

Tahap berikutnya adalah analisis dokumen. Peneliti menelaah dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah

yang berkaitan dengan pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Analisis dokumen dilakukan untuk memahami bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam praktik bernegara (Kholifah et al., 2025).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan observasi terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Observasi dilakukan dengan memperhatikan dinamika politik, sosial, dan budaya yang mencerminkan kondisi aktual bangsa. Misalnya, fenomena polarisasi politik, konflik sosial, atau kebijakan pemerataan pembangunan. Observasi ini memberikan gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi dalam memperkuat pilar kehidupan berbangsa (Ikbal Fatoni, 2025).

Tahap selanjutnya adalah analisis data. Data yang diperoleh dari literatur, dokumen, dan observasi dianalisis secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama, yaitu ideologi, konstitusi, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Setiap tema kemudian ditafsirkan untuk menemukan makna yang relevan dengan tujuan penelitian.

Tahap terakhir adalah sintesis gagasan. Peneliti menghubungkan hasil analisis dengan kondisi aktual bangsa Indonesia. Sintesis ini menghasilkan kerangka konseptual yang menjelaskan peran pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjaga stabilitas serta mewujudkan cita-cita nasional (Kholifah et al., 2025).

Dengan tahapan tersebut, penelitian kualitatif ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Metodologi yang digunakan tidak hanya menekankan pada pengumpulan data, tetapi juga pada interpretasi makna, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik kehidupan berbangsa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menghasilkan gambaran konseptual mengenai peran pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjaga stabilitas serta mewujudkan cita-cita nasional (Aziz and Najicha, 2024). Melalui analisis literatur, dokumen resmi, dan observasi fenomena sosial, ditemukan bahwa kelima pilar utama—ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945, persatuan dalam keberagaman, demokrasi, dan keadilan sosial—masih menjadi fondasi penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Namun, setiap pilar menghadapi tantangan yang berbeda, baik dari aspek internal maupun eksternal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai ideologi bangsa, tetapi internalisasi nilai-nilainya belum optimal. UUD 1945 sebagai konstitusi telah memberikan kerangka hukum yang jelas, namun implementasi di lapangan seringkali menghadapi kendala. Persatuan bangsa masih terjaga, tetapi polarisasi politik dan konflik sosial menjadi ancaman nyata. Demokrasi berjalan dengan baik melalui sistem pemilu, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Keadilan sosial menjadi tujuan akhir, tetapi kesenjangan ekonomi dan sosial masih tinggi (Ulfiyyati et al., 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai ideologi bangsa, tetapi internalisasi nilai-nilainya belum optimal. UUD 1945 sebagai konstitusi telah memberikan kerangka hukum yang jelas, namun implementasi di lapangan seringkali menghadapi kendala. Persatuan bangsa masih terjaga, tetapi polarisasi politik dan konflik sosial menjadi ancaman nyata. Demokrasi berjalan dengan baik melalui sistem pemilu, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Keadilan sosial menjadi tujuan akhir, tetapi kesenjangan ekonomi dan sosial masih tinggi.

Pilar ideologi Pancasila merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (M. Rafiq Efrianda Hutabarat and Zainarti Zainarti, 2024). Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, menjadi pedoman moral yang membentuk karakter bangsa. Dalam praktiknya, internalisasi nilai Pancasila masih menghadapi tantangan. Pendidikan Pancasila di sekolah sering dipandang sebagai mata pelajaran formal semata, bukan sebagai proses pembentukan karakter. Akibatnya, generasi muda kurang memahami makna mendalam dari nilai-nilai tersebut.

Di era globalisasi, masuknya budaya asing yang menekankan individualisme dan materialisme juga berpotensi melemahkan nilai kebersamaan dan gotong royong (Anando et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan internalisasi Pancasila melalui pendidikan, media, dan praktik kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting agar ideologi bangsa tetap relevan. Konstitusi UUD 1945 berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur tata kehidupan bernegara. Konstitusi ini menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia (Muni, 2020).

Namun, implementasi konstitusi seringkali menghadapi kendala. Penegakan hukum yang tidak konsisten menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga negara. Banyak kasus pelanggaran hukum yang tidak ditangani secara adil, sehingga muncul persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan lembaga hukum dan konsistensi dalam penegakan aturan. Dengan demikian, UUD 1945 tidak hanya menjadi teks hukum, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam praktik bernegara (I Gede Sujana et al., 2025).

Persatuan dalam keberagaman merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa keberagaman etnis, agama, bahasa, dan budaya harus dipersatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Persatuan ini menjadi pilar penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Namun, dalam praktiknya, persatuan sering diuji oleh konflik sosial dan politik. Polarisasi politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa persatuan bangsa masih rapuh. Konflik antar kelompok masyarakat juga muncul karena perbedaan agama, etnis, maupun kepentingan politik (Harahap, 2018).

Untuk memperkuat persatuan, diperlukan penanaman nilai toleransi dan solidaritas melalui pendidikan multikultural, dialog antarbudaya, serta kebijakan yang adil bagi semua kelompok masyarakat. Demokrasi sebagai pilar politik dijalankan melalui sistem perwakilan rakyat dan pemilihan umum. Demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam menentukan arah bangsa. Praktik demokrasi yang sehat dapat meningkatkan legitimasi pemerintah dan memperkuat stabilitas politik. Namun, demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa politik uang, polarisasi, dan lemahnya partisipasi masyarakat.

Politik uang merusak kualitas demokrasi karena keputusan politik didasarkan pada kepentingan materi, bukan kepentingan rakyat. Polarisasi politik juga mengancam persatuan bangsa, karena masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling berlawanan. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi, diperlukan pendidikan politik yang lebih baik. Masyarakat harus memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tetapi juga tentang partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa. Media juga harus berperan dalam memberikan informasi yang objektif dan mendidik.

Keadilan sosial merupakan tujuan akhir dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilar ini menekankan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun,

kesenjangan ekonomi dan sosial masih menjadi masalah besar. Banyak daerah yang tertinggal dalam pembangunan, sementara daerah lain sudah maju. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi kesejahteraan. Selain itu, praktik korupsi juga merusak upaya untuk mencapai keadilan sosial. Untuk memperkuat pilar keadilan sosial, diperlukan kebijakan pemerataan pembangunan yang lebih adil. Pemerintah harus fokus pada pembangunan daerah tertinggal dan memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Pemberantasan korupsi juga harus dilakukan secara konsisten agar sumber daya negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa kelima pilar kehidupan berbangsa dan bernegara masih menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan mewujudkan cita-cita nasional. Namun, setiap pilar menghadapi tantangan yang berbeda. Pancasila perlu diperkuat melalui internalisasi nilai, UUD 1945 perlu ditegakkan secara konsisten, persatuan bangsa harus dijaga melalui toleransi dan solidaritas, demokrasi perlu ditingkatkan kualitasnya, dan keadilan sosial harus diwujudkan melalui pemerataan pembangunan.

Dengan memperkuat kelima pilar tersebut, Indonesia dapat menjaga stabilitas, memperkuat identitas nasional, serta mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pilar ideologi Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai identitas bangsa. Dalam konteks sejarah, Pancasila lahir dari konsensus para pendiri bangsa yang ingin menyatukan berbagai perbedaan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi perekat yang mampu menyatukan bangsa yang majemuk. Namun, dalam perkembangan zaman, tantangan terhadap Pancasila semakin kompleks. Arus globalisasi membawa nilai-nilai baru yang seringkali bertentangan dengan budaya lokal.

Misalnya, budaya konsumtif dan individualistik yang semakin menguat di masyarakat dapat melemahkan semangat gotong royong. Oleh karena itu, revitalisasi Pancasila menjadi kebutuhan mendesak. Revitalisasi ini dapat dilakukan melalui pendidikan karakter, penguatan peran keluarga, serta media yang menampilkan teladan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari. Konstitusi UUD 1945 sebagai pilar hukum memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. Konstitusi ini memberikan kerangka yang jelas mengenai pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, serta mekanisme demokrasi.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara norma konstitusi dan implementasi di lapangan. Banyak kebijakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan semangat konstitusi. Misalnya, perlindungan terhadap hak-hak minoritas seringkali belum optimal. Selain itu, praktik korupsi di lembaga negara menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menegakkan konstitusi secara konsisten. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dapat kembali pulih.

Persatuan dalam keberagaman menjadi tantangan besar di era modern. Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat pluralitas yang tinggi. Keberagaman ini seharusnya menjadi kekuatan, namun seringkali justru menjadi sumber konflik. Polarisasi politik yang tajam, terutama dalam momentum pemilu, menunjukkan rapuhnya persatuan bangsa. Konflik horizontal antar kelompok masyarakat juga masih terjadi, baik karena perbedaan agama, etnis, maupun kepentingan ekonomi. Untuk memperkuat persatuan, diperlukan

strategi yang komprehensif. Pendidikan multikultural harus diperkuat agar generasi muda memahami pentingnya toleransi.

Media massa juga harus berperan sebagai perekat bangsa, bukan justru memperuncing perbedaan. Selain itu, kebijakan pemerintah harus adil dan merata, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan. Dengan demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika benar-benar dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Demokrasi sebagai pilar politik memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah bangsa. Demokrasi di Indonesia telah berjalan melalui sistem pemilu yang rutin dilaksanakan.

Namun, kualitas demokrasi masih perlu ditingkatkan. Politik uang masih menjadi masalah serius yang merusak integritas pemilu. Polarisasi politik juga semakin tajam, sehingga masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling berlawanan. Lemahnya literasi politik masyarakat membuat demokrasi seringkali hanya dipahami sebatas memilih dalam pemilu, bukan sebagai partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi, diperlukan pendidikan politik yang lebih intensif. Masyarakat harus diajak untuk memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang hak memilih, tetapi juga tentang kewajiban berpartisipasi dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan.

Media massa harus berperan sebagai sarana pendidikan politik, bukan sekadar penyampai informasi. Dengan demikian, demokrasi dapat berjalan dengan sehat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keadilan sosial sebagai tujuan akhir kehidupan berbangsa dan bernegara masih menghadapi tantangan besar. Kesenjangan ekonomi antara daerah maju dan daerah tertinggal masih tinggi. Banyak daerah yang belum menikmati hasil pembangunan secara merata. Selain itu, praktik korupsi merusak upaya untuk mencapai keadilan sosial. Korupsi membuat sumber daya negara tidak digunakan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan pribadi.

Untuk mewujudkan keadilan sosial, diperlukan kebijakan pemerataan pembangunan yang lebih adil. Pemerintah harus fokus pada pembangunan daerah tertinggal, serta memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Pemberantasan korupsi juga harus dilakukan secara konsisten, sehingga sumber daya negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, peran masyarakat juga penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Masyarakat harus aktif mengawasi kebijakan pemerintah dan berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan demikian, keadilan sosial dapat terwujud dan cita-cita bangsa dapat tercapai (Jamiah et al., 2025).

Keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa kelima pilar kehidupan berbangsa dan bernegara masih menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan mewujudkan cita-cita nasional. Namun, setiap pilar menghadapi tantangan yang berbeda. Pancasila perlu diperkuat melalui internalisasi nilai, UUD 1945 perlu ditegakkan secara konsisten, persatuan bangsa harus dijaga melalui toleransi dan solidaritas, demokrasi perlu ditingkatkan kualitasnya, dan keadilan sosial harus diwujudkan melalui pemerataan pembangunan. Dengan memperkuat kelima pilar tersebut, Indonesia dapat menjaga stabilitas, memperkuat identitas nasional, serta mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pilar kehidupan berbangsa dan bernegara—ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945, persatuan dalam keberagaman, demokrasi, dan keadilan sosial—merupakan fondasi utama yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Kelima pilar tersebut bukan hanya sekadar konsep normatif, melainkan pedoman praktis yang harus diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila sebagai ideologi bangsa tetap relevan di tengah arus globalisasi, namun internalisasi nilai-nilainya masih menghadapi tantangan. Pendidikan formal dan nonformal perlu lebih menekankan pembentukan karakter agar generasi muda memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara nyata. Tanpa penguatan ideologi, bangsa akan mudah terpengaruh oleh nilai-nilai asing yang tidak sejalan dengan budaya lokal. Konstitusi UUD 1945 telah memberikan kerangka hukum yang jelas, tetapi implementasi di lapangan masih belum konsisten. Penegakan hukum yang lemah menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga negara.

Oleh karena itu, komitmen untuk menegakkan konstitusi secara adil dan merata menjadi syarat mutlak agar negara dapat berjalan sesuai prinsip demokrasi dan keadilan. Persatuan dalam keberagaman adalah kekuatan sekaligus tantangan. Indonesia yang plural membutuhkan toleransi, solidaritas, dan kebijakan yang adil agar tidak terjadi konflik horizontal. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus diwujudkan dalam praktik nyata melalui pendidikan multikultural, dialog antarbudaya, serta peran media yang mendukung persatuan bangsa.

Demokrasi di Indonesia telah berjalan melalui sistem pemilu, tetapi kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Politik uang, polarisasi, dan lemahnya literasi politik masyarakat menjadi hambatan serius. Pendidikan politik dan partisipasi aktif masyarakat harus diperkuat agar demokrasi tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Keadilan sosial sebagai tujuan akhir kehidupan berbangsa masih jauh dari harapan. Kesenjangan ekonomi dan sosial, serta praktik korupsi, menjadi penghalang utama. Pemerataan pembangunan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa memperkuat kelima pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat identitas nasional, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Upaya tersebut membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Dengan demikian, Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara yang adil, makmur, dan sejahtera, sesuai dengan cita-cita yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anando, J. et al. (2024) "Pengaruh Pendidikan Pancasila dalam Melawan Pengaruh Ideologi Barat," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(3), pp. 1844–1855. Available at: <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i3.815>.
- Aziz, S. and Najicha, F.U. (2024) "Peran Pendidikan Pancasila Dalam Mewujudkan Cita-Cita Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), pp. 11–21. Available at: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v8i1.5567>.
- Benawa, A. (2012) "Kontribusi Pendidikan Dalam Membangun Pengetahuan dan Karakter Bangsa," *Humaniora*, 3(2), p. 354. Available at: <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3329>.

- Firiza, F. et al. (2025) "Penerapan Immutable Principle Dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 5(02), pp. 169–186. Available at: <https://doi.org/10.28918/manabia.v5i02.13935>.
- Harahap, S. (2018) "Konflik Etnis Dan Agama Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 1(2), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5096>.
- I Gede Sujana et al. (2025) "Integrasi Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Hukum Nasional," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(2), pp. 66–74. Available at: <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i2.215>.
- Ikbal Fatoni (2025) "Membangun Generasi Berkarakter: Pendidikan Berbasis Nilai sebagai Pilar Bangsa," *Jurnal Harmoni Pendidikan*, 1(1), pp. 36–44. Available at: <https://doi.org/10.64845/jhp.v1i1.31>.
- Irham, M.A. (2017) "Pengamanan Pilar Bangsa Dan Masa Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia," *KALAM*, 6(1), p. 125. Available at: <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.398>.
- Jamiah, K. et al. (2025) "Keadilan sosial dalam perspektif Alquran dan Pancasila," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 9(1), pp. 68–89. Available at: <https://doi.org/10.14421/panangkaran.v9i1.4278>.
- Kholifah, U.N. et al. (2025) "Analisis Konsep-Konsep Hukum Di Indonesia," *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, 7(2), pp. 46–61. Available at: <https://doi.org/10.56071/justitable.v7i2.1161>.
- M. Rafiq Efrianda Hutabarat and Zainarti Zainarti (2024) "Pancasila Sebagai Fondasi Utama Dalam Implementasi Dan Signifikansi Nasional," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), pp. 1219–1225. Available at: <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.417>.
- Muhammad Sabiq Balya (2025) "Pembangunan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pada Nilai-Nilai Pancasila," *Grondwet*, 4(1), pp. 37–49. Available at: <https://doi.org/10.61863/gr.v4i1.48>.
- Muni, A. (2020) "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia," *Al'adalah*, 23(1), pp. 65–78. Available at: <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.27>.
- Mutmainnah, W. and Maulia, S.T. (2024) "Penerapan Sistem Demokrasi untuk Menjaga Persatuan dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya," *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), pp. 111–117. Available at: <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.284>.
- Nuna, M. and Moonti, R.M. (2019) "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), pp. 110–127. Available at: <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>.
- Pisqiantin Aenan Salsabila et al. (2026) "Pendidikan Kewarganegaraan: Pilar Utama Dalam Membangun Bangsa Yang Cerdas Dan Bermartabat," *Journal of Social and Education*, 2(1), pp. 81–87. Available at: <https://doi.org/10.66909/lrp.salut.v2i1.126>.
- Syamzaimar (2025) *Pendidikan Kewarganegaraan Implementasi Pengalaman Islam*. Cetakan Pertama. Tembilahan-Riau-Indonesia: PT. Indragiri Dot Com.
- Ulfiyyati, A. et al. (2023) "Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan," *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), pp. 435–444. Available at: <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.48>.
- Zalukhu, A. (2025) "Implementasi Nilai Moderasi Beragama melalui Pendidikan Kristen di Indonesia: Analisis atas Empat Pilar Moderasi Beragama," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika*, 8(2), pp. 339–357. Available at: <https://doi.org/10.34081/fidei.v8i2.647>.